# DOKUMEN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

## BIRO PEREKONOMIAN
## SETDA PROVINSI DKI JAKARTA

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Rencana Kerja (Renja) Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 dapat disusun dengan baik.

Renja merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang disusun dengan memedomani Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020. Secara substansi, dokumen Renja Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 memuat hasil evaluasi Renja Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta tahun lalu (n-2), tujuan dan sasaran Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta, serta rencana kerja dan pendanaan Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta.

Kami sadari bahwa masih terdapat kekurangan yang membutuhkan perbaikan dan penyempurnaan dalam perencanaan pembangunan, khususnya urusan Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, rekomendasi yang konstruktif tetap akan menjadi masukan dalam identifikasi permasalahan pembangunan, arah kebijakan pembangunan, program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja, penyelarasan dengan sasaran dan prioritas nasional, dan identifikasi program dan kegiatan menurut kewenangan Provinsi dan Kota/Kabupaten di masa yang akan datang.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan dokumen Renja Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai kita semua.

Jakarta, Juli 2019
Kepala Biro Perekonomian
Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Mochamad Abbas
NIP 197006091997031004

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar
Daftar Isi i-1
Executive Summary i-6
BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1. Latar Belakang I-2
1.2. Landasan Hukum I-3
1.3. Maksud dan Tujuan I-5
1.4. Sistematika Penulisan I-6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ..... II-2
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ..... II-12
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ..... II-14
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD..... II-14
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..... II-16
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH III-1
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ..... III-2
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ..... III-3
3.3. Program dan Kegiatan ..... III-5
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH IV-1
BAB V PENUTUP V-1
Lampiran I Diisi judul lampiran (jika ada)
Lampiran II Diisi judul lampiran (jika ada)
Lampiran III Diisi judul lampiran (jika ada)
Lampiran IV Diisi judul lampiran (jika ada)

# EXECUTIVE SUMMARY

Dokumen ini merupakan penjelasan ringkas tentang Renja perangkat daerah, keterkaitan antara Renja dengan RKPD dan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah, serta proses penyusunan Renja.

Dokumen Renja Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta 2020 berisi perencanaan kerja untuk periode tahun 2020, serta menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 (n-2) dan perkiraan capaian tahun 2019 (n-1), analisis kinerja pelayanan Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta, review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang bersumber dari hasil Rembuk RW, usulan langsung masyarakat.

# PENDAHULUAN

# 1

Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud & Tujuan, Sistematika Penulisan

## 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Penyusunannya berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Renja sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang dalam pasal 15 Ayat (1) mengamatkan bahwa ”Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah”.

Proses penyusunan Renja Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Rancangan Awal RKPD Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu penyusunan Renja Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD Tahun 2020. Selain itu juga dengan mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap Renja Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta tahun sebelumnya, target kinerja tahun 2020 dalam Renstra Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 dan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
21. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020;
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
24. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
25. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;

28. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
29. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah, dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
30. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
31. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;
32. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah;
33. Peraturan Gubernur Nomor 250 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
34. Keputusan Gubernur Nomor 1959 Tahun 2018 tentang Standardisasi Usulan Kegiatan Rembuk Rukun Warga Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
35. Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah;
36. Keputusan Gubernur Nomor 150 Tahun 2019 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
37. Instruksi Gubernur Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2019 Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 disusun untuk mewujudkan target kinerja tahun 2020 dengan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki.

Adapun tujuan penyusunan Renja Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta ke dalam rencana operasional tahunan;

2. Menyediakan arahan/pedoman bagi aparatur Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020;
3. Menjadi alat ukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan tugas Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta.

Sesuai dengan dokumen Rancangan Awal RKPD Tahun 2020, tema pembangunan pada tahun 2020 adalah "**Memacu Pertumbuhan Berkualitas**". Berkualitas di sini dimaknai dengan hasil pertumbuhan dan pembangunan Provinsi DKI Jakarta secara merata dapat dinikmati oleh seluruh warga Jakarta.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sebagaimana telah diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dokumen Renja Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijabarkan penjelasan ringkas tentang Renja perangkat daerah, keterkaitan antara Renja dengan RKPD dan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah, serta proses penyusunan Renja.

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini berisi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 (n-2) dan perkiraan capaian tahun 2019 (n-1); analisis kinerja pelayanan Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta; isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta; review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang bersumber dari hasil Rembuk RW, usulan langsung masyarakat.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dijabarkan penelaahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta, program dan kegiatan.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi uraian penutup yang terdiri atas catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

# HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

# 2

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi, Review Ranwal RKPD, Penelaahan Program dan Kegiatan Masyarakat

## 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta

Pada bagian ini menjelaskan tentang evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 dan Capaian Renstra Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2018. Fungsi evaluasi ini adalah dalam rangka penyediaan informasi-informasi yang berguna untuk menentukan strategi dan kegiatan Renja Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020. Evaluasi atau reviu akan dilakukan terhadap realisasi program dan kegiatan Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 serta realisasi target sasaran Renstra Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2018. Selain itu juga akan dilakukan reviu terhadap pelaksanaan kegiatan tahun 2019 dan proyeksi realisasi anggaran tahun 2019.

Reviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 ditinjau dari capaian program dapat dilihat dalam Tabel 2.1. Program yang digunakan pada tahun 2018 berbeda dengan program yang digunakan untuk tahun 2019-2022 dalam Renstra Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022, sebab proses penyusunan Rencana Kerja Tahun 2018 dilakukan pada tahun 2017 dan proses penyusunan RPJMD serta Renstra OPD masih berlangsung sampai dengan tahun 2018. Landasan penggunaan program tahun 2018 adalah Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 645 Tahun 2017 tentang Penetapan Daftar Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Menurut Urusan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018.

Terdapat 1 (satu) program utama yang diampu oleh Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta yaitu program Program Koordinasi Kebijakan Perekonomian. Selain itu terdapat 1 (satu) program yang bersifat umum dan digunakan oleh seluruh OPD yaitu program “Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD”.

Realisasi capaian program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan terdiri dari 3 (tiga) indikator realiasi capaian yang sudah sesuai dengan target.

Tabel 2.1 Realisasi Capaian Program Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

| No | Program | Indikator Kinerja | Cara Perhitungan | Target | Realisasi | Capaian | Kriteria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Program Koordinasi Kebijakan Perekonomian | Jumlah ketidaksesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan lingkup | Jumlah ketidaksesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan lingkup bidang perekonomian | 0 | 0 | 100% | |
| | | Jumlah ketidaksesuaian antara kebijakan dengan peraturan | Jumlah ketidaksesuaian antara kebijakan dengan peraturan lingkup perekonomian | 0 | 0 | 100% | |
| 2 | Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor | Indeks kepuasan pelayanan kantor | Indeks kepuasan pelayanan kantor berdasarkan realisasi pelaksanaan program pada monev.<br>Indeks 1 = 0-25%,<br>Indeks 2 = > 25-50%,<br>Indeks 3 = > 50-75%, dan<br>Indeks 4 = > 75-100% | 4 | 4 | 100% | |

Secara rinci hasil evaluasi pelaksanaan Renja Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta dan pencapaian Renstra Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta sampai dengan Tahun 2019, dapat dilihat pada tabel 2.2. Dalam tabel dimaksud dapat dilihat capaian masing-masing kegiatan Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2018 dan 2019. Pada tahun 2018, 22 target kegiatan dapat dicapai, hanya 10 target kegiatan belum dapat dicapai. Berikut daftar kegiatan Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta yang tidak mencapai target pada tahun 2018:

1. Kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah, persentase realisasi anggaran sebesar 97,05% (pada satu kali pelaksanaan menggunakan Narasumber PNS),
2. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pariwisata dan Kebudayaan di Provinsi DKI Jakarta, persentase realisasi anggaran sebesar 89,93% (Penyewaan Kapal Kunjungan Lapangan ke Kepulauan Seribu),
3. Penyusunan Kajian Aktivitas Bidang Perekonomian, persentase realisasi anggaran sebesar 96,76%,
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, persentase realisasi anggaran sebesar 85,92% (Selisih harga penawaran dalam Pengadaan Langsung),
5. Penyediaan Makanan dan Minuman, persentase realisasi anggaran sebesar 99,87% (Sesuai kebutuhan),
6. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja, persentase realisasi anggaran sebesar 64,98% (Sesuai kebutuhan),
7. Penyediaan Alat Tulis Kantor, persentase realisasi anggaran sebesar 79,75% (Selisih harga penawaran dalam Pengadaan Langsung),
8. Penyediaan Sewa Mesin Foto Copy, persentase realisasi anggaran sebesar 91,54%,
9. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, persentase realisasi anggaran sebesar 88,74% (Sesuai kebutuhan),
10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja, persentase realisasi anggaran sebesar 80,19% (eCatalog)

Sedangkan, pada tahun 2019 program yang digunakan berbeda dengan tahun 2018. Sehingga perkiraan realisasinya belum dihitung pada Dokumen Renja Bappeda Tahun 2020. Namun untuk kegiatan 2019 relatif sama dengan kegiatan pada tahun 2018.

Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta s.d. Tahun 2019 Provinsi DKI Jakarta

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Renstra Perangkat Daerah tahun 2022 | Realisasi Target Kinerja Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 | | | Target kegiatan (Renja tahun 2019) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. tahun 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja tahun 2018 | Realisasi Renja tahun 2018 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2019 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
| **4** | **Penunjang Urusan Pemerintahan** | | | | | | | | | |
| **4.06** | **Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan** | | | | | | | | | |
| **4.06.25** | **Program Koordinasi Kebijakan Perekonomian** | | | | | | | | | |
| | Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Perikanan dan Kelautan di Provinsi DKI Jakarta | Jumlah ketidaksesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan / Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Perikanan dan Kelautan di Provinsi DKI Jakarta | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% |
| | Pemantauan Harga Pangan Strategis di Provinsi DKI Jakarta | Jumlah ketidaksesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan / Jumlah dokumen hasil pemantauan harga pangan strategis di Provinsi DKI Jakarta | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Renstra Perangkat Daerah tahun 2022 | Realisasi Target Kinerja Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 | | | Target kegiatan (Renja tahun 2019) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. tahun 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja tahun 2018 | Realisasi Renja tahun 2018 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2019 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
| | Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran pada SKPD Bidang Perekonomian | Jumlah ketidaksesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan / Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bidang Perekonomian | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% |
| | Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Badan Usaha Milik Daerah | Jumlah ketidaksesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan / Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Badan Usaha Milik Daerah | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% |
| | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan pada PTSP di Provinsi DKI Jakarta | Jumlah ketidaksesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan / Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan pada PTSP di Provinsi DKI Jakarta | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Renstra Perangkat Daerah tahun 2022 | Realisasi Target Kinerja Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 | | | Target kegiatan (Renja tahun 2019) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. tahun 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja tahun 2018 | Realisasi Renja tahun 2018 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2019 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
| | Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Perhubungan di Provinsi DKI Jakarta | Jumlah ketidaksesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan / Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Perhubungan di Provinsi DKI Jakarta | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% |
| | Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pariwisata dan Kebudayaan di Provinsi DKI Jakarta | Jumlah ketidaksesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan / Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pariwisata dan Kebudayaan di Provinsi DKI Jakarta | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% |
| | Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tenaga Kerja di Provinsi DKI Jakarta | Jumlah ketidaksesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan / Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tenaga Kerja di Provinsi DKI Jakarta | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Renstra Perangkat Daerah tahun 2022 | Realisasi Target Kinerja Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 | | | Target kegiatan (Renja tahun 2019) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. tahun 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja tahun 2018 | Realisasi Renja tahun 2018 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2019 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
| | Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Transmigrasi di Provinsi DKI Jakarta | Jumlah ketidaksesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan / Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Transmigrasi di Provinsi DKI Jakarta | 1 Laporan | - | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% |
| | Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Perdagangan di Provinsi DKI Jakarta | Jumlah ketidaksesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan / Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Perdagangan di Provinsi DKI Jakarta | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% |
| | Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Perindustrian di Provinsi DKI Jakarta | Jumlah ketidaksesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan / Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Perindustrian di Provinsi DKI Jakarta | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% |
| | Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Energi di Provinsi DKI Jakarta | Jumlah ketidaksesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan / Jumlah laporan Monitoring dan | 1 Laporan | - | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Renstra Perangkat Daerah tahun 2022 | Realisasi Target Kinerja Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 | | | Target kegiatan (Renja tahun 2019) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. tahun 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja tahun 2018 | Realisasi Renja tahun 2018 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2019 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
| | | Evaluasi Kegiatan Energi di Provinsi DKI Jakarta | | | | | | | | |
| | Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi DKI Jakarta | Jumlah ketidaksesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan / Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi DKI Jakarta | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% |
| | Koordinasi Peningkatan Peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah | Jumlah ketidaksesuaian antara kebijakan dengan peraturan / Jumlah dokumen hasil tim pengendalian inflasi daerah | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% |
| | Penyusunan Kajian Aktivitas Bidang Ekonomi | Jumlah ketidaksesuaian antara kebijakan dengan peraturan / Jumlah dokumen hasil Kajian Aktivitas Bidang Ekonomi | 8 Kajian | - | 3 Kajian | 3 Kajian | 100% | 7 Kajian | 7 Kajian | 88% |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Renstra Perangkat Daerah tahun 2022 | Realisasi Target Kinerja Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 | | | Target kegiatan (Renja tahun 2019) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. tahun 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja tahun 2018 | Realisasi Renja tahun 2018 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2019 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
| | Penyusunan Naskah Akademis Kewirausahaan | Jumlah ketidaksesuaian antara kebijakan dengan peraturan / Jumlah dokumen Naskah Akademis Kewirausahaan | - | - | - | - | - | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| **4.06.26** | **Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Perekonomian** | | | | | | | | | |
| | Penyediaan Sewa Mesin Fotokopi | Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor / Jumlah Mesin Fotocopy yang tersedia | 2 Unit | 2 Unit | 2 Unit | 2 Unit | 100% | 2 Unit | 2 Unit | 100% |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor / Barang Cetakan dan Penggadaan yang tersedia | 3 Jenis | 6 Jenis | 2 Jenis | 2 Jenis | 100% | 3 Jenis | 3 Jenis | 100% |
| | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor / Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang dilakukan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja | Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor / Jumlah Mesin Peralatan dan Perlengkapan Kerja yang terpelihara | 3 Jenis Peralatan dan Perlengk. Kerja | 2 Jenis Peralatan dan Perlengk. Kerja | 2 Jenis Peralatan dan Perlengk. Kerja | 2 Jenis Peralatan dan Perlengk. Kerja | 100% | 3 Jenis Peralatan dan Perlengk. Kerja | 3 Jenis Peralatan dan Perlengk. Kerja | 100% |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Renstra Perangkat Daerah tahun 2022 | Realisasi Target Kinerja Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 | | | Target kegiatan (Renja tahun 2019) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. tahun 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja tahun 2018 | Realisasi Renja tahun 2018 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2019 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
| | Penyediaan Makanan dan Minuman | Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor / Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman yang tersedia | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor / Jumlah Mesin Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 5 Jenis Peralatan dan Perlengk. Kerja | 1 Jenis Peralatan dan Perlengk. Kerja | 6 Jenis Peralatan dan Perlengk. Kerja | 6 Jenis Peralatan dan Perlengk. Kerja | 100% | 5 Jenis Peralatan dan Perlengk. Kerja | 5 Jenis Peralatan dan Perlengk. Kerja | 100% |
| | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor / Jumlah ATK yang tersedia | 42 Jenis | 32 Jenis | 32 Jenis | 32 Jenis | 100% | 42 Jenis | 42 Jenis | 100% |

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 250 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Biro Perekonomian dalam pelaksanaan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta.

Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang digunakan, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing- masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Berikut disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel T-C.30 sebagai berikut:

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta_Provinsi DKI Jakarta s.d. Tahun 2018

| No | Indikator | SPM/Standar Nasional | Indikator Kinerja Kunci (IKK) | Target Renstra Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Kajian strategi dan kebijakan Ketahanan Pangan di DKI Jakarta | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | |
| 2 | Kajian peningkatan manajemen lokbin PKL dalam aspek perpasaran di DKI Jakarta | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | |
| 3 | Koordinasi penyelenggaraan sektor perhubungan | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | |
| 4 | Evaluasi perkembangan perekonomian DKI Jakarta | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | |
| 5 | Koordinasi dan monitoring kerjasama pembangunan / peremajaan pasar | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | |
| 6 | Koordinasi pengendalian pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | |

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta

Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal diantaranya harmonisasi kebijakan (Masih ada kebijakan yang belum disesuaikan/diperbarui/direvisi sesuai dengan kondisi saat ini), ketersediaan data (data mikro ekonomi belum lengkap tersedia, koordinasi dengan SKPD lain perlu ditingkatkan terkait data), Kurangnya SDM (banyak yang masuk masa purna bhakti, pendidikan pegawai belum sesuai kebutuhan / persyaratan).

Isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta dalam perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan, evaluasi, serta pembinaan urusan pemerintahan umum antara lain Optimalisasi penyusunan kebijakan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, membina pelaksanaan kebijakan urusan pariwisata, kebudayaan, tenaga kerja, transmigrasi, perhubungan, perindustrian, energi dan sumber daya mineral, koperasi, usaha kecil, dan menengah, perdagangan, kelautan dan perikanan, pertanian, pangan, serta mengoordinasikan penyusunan perumusan kebijakan badan usaha milik daerah, dan penanaman modal.

## 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap SKPD dalam menyusun rancangan renja SKPD. Tahun 2019, Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta memiliki 11 (sebelas) Kegiatan Strategis Daerah (KSD) dengan 14 (empat belas) Rencana Aksi yang menjadi penanggungjawabnya, namun tidak memiliki anggaran untuk kegiatan yang mendukung Kegiatan Strategis Daerah. Pada pelaksanaannya, Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta tetap menjalankan Kegiatan Strategis Daerah tersebut karena sudah merupakan tugas pokok dan fungsinya. Informasi hasil perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Provinsi DKI Jakarta

Nama Perangkat Daerah : Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
Lembar …. dari …..

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | NIHIL | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki kegiatan yang berasal dari usulan masyarakat dalam forum musrenbang.

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020
Provinsi DKI Jakarta

Nama Perangkat Daerah: Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
Lembar …. dari …..

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | NIHIL | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# TUJUAN & SASARAN PERANGKAT DAERAH

# 3

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan

## 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

### 3.1.1 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020

Kebijakan Nasional yang menjadi salah satu rujukan bagi Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 adalah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 dengan tema “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”. RKP Tahun 2020 adalah RKP transisi, menunggu RPJMN Tahun 2020-2024 selesai disusun, sehingga dalam menentukan stuktur prioritasnya menggunakan RKP sebelumnya.

Prioritas Pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2020 antara lain yaitu:

1. Pembangunan manusia;
2. Penguatan konektivitas;
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi;
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air;
5. Stabilitas keamanan nasional.

Merujuk kepada lima prioritas tersebut, ada yang berkaitan secara langsung dengan tugas dan fungsi Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta selaku pengemban urusan Pemerintahan

### 3.1.2 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

TPB/SDGs merupakan kerangka kerja pembangunan yang memiliki tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. TPB/SDGs diformulasikan ke dalam 17 Goals, 169 Target/Sasaran, dan 241 Indikator. Dalam Gambar 3.1 terdapat rincian tujuh belas tujuan TPB/SDGs.

Gambar 3.1
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs)

Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta memiliki keterkaitan erat terhadap 5 (lima) tujuan dari 17 Tujuan TPB/SDGs. 5 tujuan tersebut yaitu tujuan nomor 7, 8, 9, 10 dan 17:

Goals 7 - Energi bersih dan terjangkau

Goals 8 - Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi

Goals 9 - Industri, inovasi dan infrastruktur

Goals 10 - Berkurangnya kesenjangan

Goals 17 - Kemitraan untuk mencapai tujuan

## 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Renja Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 merujuk kepada Rencana Strategis Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022. Di mana tujuannya adalah mendukung tercapainya Misi ke-4 RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2020, yaitu Penunjang Urusan Pemerintahan (4), Fungsi Lain Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan (4.6) Sehingga tujuan dan sasaran Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta seperti yang terdapat dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke- | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel | Skor EKPPD | | | | | |
| | | Program Koordinasi Kebijakan Perekonomian | Jumlah ketidaksesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan | 0 Kasus | 0 Kasus | 0 Kasus | 0 Kasus | 0 Kasus |
| | | | Jumlah ketidaksesuaian antara kebijakan dengan Peraturan | 0 Kasus | 0 Kasus | 0 Kasus | 0 Kasus | 0 Kasus |
| | | Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor | Indeks kepuasan pelayanan kantor | 4 Indeks | 4 Indeks | 4 Indeks | 4 Indeks | 4 Indeks |

Sebagaimana Tujuan dan Sasaran Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta pada Tabel 4.1 dan isu-isu penting yang perlu diselesaikan oleh Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020, maka prioritas kerja Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2020 antara lain:

1. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian
2. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembinaan BUMD, Penanaman Modal, PTSP, dan Ekonomi Daerah
3. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
4. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Perindustrian, Energi, Koperasi, UKM, serta Perdagangan
5. Pelaksanaan Workshop Kemitraan Pengembangan Usaha
6. Pelaksanaan Focuss Group Discussion Permodalan UKM
7. Pendampingan Perumusan Kebijakan Perekonomian

8. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT)
9. Pendampingan Evaluasi Perizinan Ketataruangan, Pembangunan, dan Pertanahan

## 3.3 Program dan Kegiatan

Program yang digunakan Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2018 berbeda dengan yang digunakan sebelumnya. Sebab, Renja 2018 adalah Renja peralihan yang tidak berpedoman kepada RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 dan RPJMD 2017-2022 belum mulai disusun.

Pada Renja 2020 menggunakan program yang terdapat di Renstra Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 terdiri 1 program utama dan 1 program operasional. Program tersebut antara lain:

1. Program Koordinasi Kebijakan Perekonomian;
2. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Perekonomian;

Rencana Kerja Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 berserta rencana pendanaannya terdapat dalam Tabel 3.2 yang menampilkan program, kegiatan, dan rencana anggaran Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020. Pada tahun ini terdapat 2 program dan 23 kegiatan. Penjelasan secara rinci terdapat dalam Tabel 3.2 berikut. Data anggaran pada Tabel 3.2 berdasarkan tarikan sistem apbd.jakarta.go.id.

Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta memiliki 14 Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah yang menjadi penanggungjawabnya, antara lain :

1. Workshop untuk Perijinan (KSD 10-Pembangunan Stadion Olahraga Bertaraf Internasional),
2. Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Akademi Jakarta dan Dewan Kesenian Jakarta oleh Tim Revitalisasi Taman Ismail Marzuki (KSD 19-Pengembangan Pariwisata dan Budaya melalui Revitalisasi Taman Ismail Marzuki),
3. Penyusunan Regulasi tentang pembentukan dan pengembangan kewirausahaan (KSD 20-Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu),

4. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PKT (KSD 20-Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu),
5. Pelaksanaan sosialisasi dan Bimtek Sistem Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (KSD 20-Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu),
6. Perijinan (KSD 20-Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu),
7. Penugasan SPAM Jatiluhur Kepada PD AM Jaya (KSD 21-Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih),
8. Penyusunan Skema Percepatan Supply Program DP 0 melalui Perlibatan Pihak Swasta (KSD 24-Penyediaan Perumahan melalui Skema Pendanaan Uang Muka Nol Rupiah (DP 0 Rupiah)),
9. Penyampaian Business Model dari Operator (PT. MRT Jakarta, PT. LRT Jakarta dan PT. Transportasi Jakarta) (KSD 37-Peningkatan layanan sistem pembayaran elektronik transportasi terpadu melalui Electronic Fare Collection (EFC)),
10. Pembangunan dan Pengembangan Dashboard Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) (KSD 43-Pengembangan Smart City dan E-Governance melalui Dashboard Program Prioritas, Integrasi Data Kependudukan dan Jakarta One),
11. Penyusunan Pola Pengenaan Tarif dalam Pelayanan Air Bersih di Kepulauan Seribu (KSD 51-Penyediaan Pengolahan dan Pengelolaan Air Bersih di Kepulauan Seribu),
12. Penerbitan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengkajian dan Pengembangan Taman Benyamin Suaeb (KSD 54-Pembangunan Taman Benyamin Suaeb),
13. Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Festival Seni Budaya Sepanjang Tahun (KSD 56-Pelaksanaan Festival Seni dan Budaya Sepanjang Tahun),
14. Peningkatan pelayanan SKPD/UKPD dalam menangani aduan masyarakat bidang Perekonomian (KSD 60-Peningkatan Layanan Pengaduan Masyarakat melalui Open House Kecamatan dan aplikasi Citizen Relation Management (CRM)).

Tabel 3.2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020
dan Perkiraan Maju Tahun 2021 Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta

| Kode | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | Program | Kegiatan | | Program | Kegiatan | | | | Program | Kegiatan | |
| **4** | | | | **Penunjang Urusan Pemerintahan** | | | | | | | | | | | |
| **4** | **06** | | | **Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan** | | | | | | **2,633,753,193** | | | | | **0** |
| **4** | **06** | **25** | | **Program Koordinasi Kebijakan Perekonomian** | | | | | | **1,823,275,832** | | | | | **0** |
| 4 | 06 | 25 | 001 | Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian | Jumlah ketidaksesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan | Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian | Provinsi DKI Jakarta | 0 kasus | 3 Laporan | 63,893,365 | PAD | | 0 kasus | | 0 |
| 4 | 06 | 25 | 002 | Penyusunan Kajian Kebijakan Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian | Jumlah ketidaksesuaian antara kebijakan dengan peraturan | Jumlah Kajian Kebijakan Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian | Provinsi DKI Jakarta | 0 kasus | 2 Kajian | 0 | PAD | | 0 kasus | | 0 |
| 4 | 06 | 25 | 003 | Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembinaan BUMD, Penanaman Modal, PTSP, dan Ekonomi Daerah | Jumlah ketidaksesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembinaan BUMD, Penanaman Modal, PTSP, dan Ekonomi Daerah | Provinsi DKI Jakarta | 0 kasus | 3 Laporan | 40,342,100 | PAD | | 0 kasus | | 0 |
| 4 | 06 | 25 | 004 | Penyusunan Kajian Kebijakan Pembinaan BUMD, Penanaman Modal, PTSP, dan Ekonomi Daerah | Jumlah ketidaksesuaian antara kebijakan dengan peraturan | Jumlah Kajian Kebijakan Pembinaan BUMD, Penanaman Modal, PTSP dan Ekonomi Daerah | Provinsi DKI Jakarta | 0 kasus | 3 Kajian | 0 | PAD | | 0 kasus | | 0 |

| Kode | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | Program | Kegiatan | | Program | Kegiatan | | | | Program | Kegiatan | |
| 4 | 06 | 25 | 005 | Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi | Jumlah ketidaksesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi | Provinsi DKI Jakarta | 0 kasus | 4 Laporan | 30,322,800 | PAD | | 0 kasus | | 0 |
| 4 | 06 | 25 | 006 | Penyusunan Kajian Kebijakan Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi | Jumlah ketidaksesuaian antara kebijakan dengan peraturan | Jumlah Kajian Kebijakan Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Provinsi DKI Jakarta | 0 kasus | 3 Kajian | 0 | PAD | | 0 kasus | | 0 |
| 4 | 06 | 25 | 007 | Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Perindustrian, Energi, Koperasi, UKM, serta Perdagangan | Jumlah ketidaksesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Perindustrian, Energi, Koperasi, UKM, serta Perdagangan | Provinsi DKI Jakarta | 0 kasus | 4 Laporan | 73,522,800 | PAD | | 0 kasus | | 0 |
| 4 | 06 | 25 | 008 | Penyusunan Kajian Kebijakan Perindustrian, Energi, Koperasi, UKM, serta Perdagangan | Jumlah ketidaksesuaian antara kebijakan dengan peraturan | Jumlah Kajian Kebijakan Perindustrian, Energi, Koperasi, UKM serta Perdagangan | Provinsi DKI Jakarta | 0 kasus | 3 Kajian | 0 | PAD | | 0 kasus | | 0 |
| 4 | 06 | 25 | 009 | Workshop kemitraan pengembangan usaha | Jumlah ketidaksesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan | Jumlah pelaksanaan workshop | Provinsi DKI Jakarta | 0 kasus | 1 Kali | 0 | PAD | | 0 kasus | | 0 |

| Kode | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | Program | Kegiatan | | Program | Kegiatan | | | | Program | Kegiatan | |
| 4 | 06 | 25 | 010 | Focuss Group Discussion Permodalan UKM | Jumlah ketidaksesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan | Jumlah pelaksanaan FGD permodalan UKM | Provinsi DKI Jakarta | 0 kasus | 1 Kali | 0 | PAD | | 0 kasus | | 0 |
| 4 | 06 | 25 | 011 | Pengembangan Kapasitas Pegawai Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta | Jumlah ketidaksesuaian antara kebijakan dengan peraturan | Jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan kapasitas | Provinsi DKI Jakarta | 0 kasus | 56 Orang | 0 | PAD | | 0 kasus | | 0 |
| 4 | 06 | 25 | 012 | Pelaksanaan Workshop Kemitraan Pengembangan Usaha | Jumlah ketidaksesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan | Jumlah pelaksanaan workshop | Provinsi DKI Jakarta | 0 kasus | 1 Kali | 15,455,700 | PAD | | 0 kasus | | 0 |
| 4 | 06 | 25 | 013 | Pelaksanaan Focuss Group Discussion Permodalan UKM | Jumlah ketidaksesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan | Jumlah pelaksanaan FGD permodalan UKM | Provinsi DKI Jakarta | 0 kasus | 1 Kali | 12,005,700 | PAD | | 0 kasus | | 0 |
| 4 | 06 | 25 | 014 | Pendampingan Perumusan Kebijakan Perekonomian | Jumlah ketidaksesuaian antara kebijakan dengan peraturan | Jumlah Kebijakan Perekonomian | Provinsi DKI Jakarta | 0 kasus | 12 Kajian Kebijakan | 891,000,000 | PAD | | 0 kasus | | 0 |
| 4 | 06 | 25 | 015 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) | Jumlah ketidaksesuaian antara kebijakan dengan peraturan | Waktu pengelolaan Sistem Informasi PKT | Provinsi DKI Jakarta | 0 kasus | 12 Bulan | 151,333,367 | PAD | | 0 kasus | | 0 |

| Kode | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | Program | Kegiatan | | Program | Kegiatan | | | | Program | Kegiatan | |
| 4 | 06 | 25 | 016 | Pendampingan Evaluasi Perizinan Ketataruangan, Pembangunan, dan Pertanahan | Jumlah ketidaksesuaian antara kebijakan dengan peraturan | Waktu Pendampingan | Provinsi DKI Jakarta | 0 kasus | 6 Bulan | 545,400,000 | PAD | | 0 kasus | | 0 |
| **4** | **06** | **26** | | **Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Perekonomian** | | | | | | **810,477,361** | | | | | **0** |
| 4 | 06 | 26 | 001 | Penyediaan alat tulis kantor | indeks kepuasan pelayanan kantor | Waktu penyediaan alat tulis kantor | Provinsi DKI Jakarta | 4 indeks | 12 Bulan | 100,000,000 | PAD | | 4 indeks | | 0 |
| 4 | 06 | 26 | 002 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | indeks kepuasan pelayanan kantor | Waktu ketersediaan barang cetakan dan penggandaan | Provinsi DKI Jakarta | 4 indeks | 12 Bulan | 16,966,290 | PAD | | 4 indeks | | 0 |
| 4 | 06 | 26 | 003 | Penyediaan sewa mesin fotokopi | indeks kepuasan pelayanan kantor | Jumlah mesin foto copy yang tersedia | Provinsi DKI Jakarta | 4 indeks | 2 Unit | 117,480,000 | PAD | | 4 indeks | | 0 |
| 4 | 06 | 26 | 004 | Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja | indeks kepuasan pelayanan kantor | Waktu pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja | Provinsi DKI Jakarta | 4 indeks | 12 Bulan | 33,185,471 | PAD | | 4 indeks | | 0 |
| 4 | 06 | 26 | 005 | Penyediaan makanan dan minuman | indeks kepuasan pelayanan kantor | Waktu penyediaan makanan dan minuman | Provinsi DKI Jakarta | 4 indeks | 12 Bulan | 539,272,400 | PAD | | 4 indeks | | 0 |
| 4 | 06 | 26 | 006 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | indeks kepuasan pelayanan kantor | Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan | Provinsi DKI Jakarta | 4 indeks | 12 Bulan | 3,573,200 | PAD | | 4 indeks | | 0 |
| 4 | 06 | 26 | 007 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | indeks kepuasan pelayanan kantor | Waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja | Provinsi DKI Jakarta | 4 indeks | 12 Bulan | 0 | PAD | | 4 indeks | | 0 |

# RENCANA KERJA & PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4

Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja dan Pendanaan Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta yang diambil dari tarikan sistem apbd.jakarta.go.id (eBudgeting) saat tutup tahapan RKPD 2020 sebesar Rp 2.633.753.193,- dengan rincian sebagaimana Tabel berikut :

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD/UKPD Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Provinsi DKI Jakarta**

| Kode | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | Program | Kegiatan | | Program | Kegiatan | | | | Program | Kegiatan | |
| **4** | | | | **Penunjang Urusan Pemerintahan** | | | | | | | | | | | |
| **4** | **06** | | | **Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan** | | | | | | **2,633,753,193** | | | | | **0** |
| **4** | **06** | **25** | | **Program Koordinasi Kebijakan Perekonomian** | | | | | | **1,823,275,832** | | | | | **0** |
| 4 | 06 | 25 | 001 | Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian | Jumlah ketidaksesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan | Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian | Provinsi DKI Jakarta | 0 kasus | 3 Laporan | 63,893,365 | PAD | | 0 kasus | | 0 |
| 4 | 06 | 25 | 002 | Penyusunan Kajian Kebijakan Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian | Jumlah ketidaksesuaian antara kebijakan dengan peraturan | Jumlah Kajian Kebijakan Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian | Provinsi DKI Jakarta | 0 kasus | 2 Kajian | 0 | PAD | | 0 kasus | | 0 |
| 4 | 06 | 25 | 003 | Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembinaan BUMD, Penanaman Modal, PTSP, dan Ekonomi Daerah | Jumlah ketidaksesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembinaan BUMD, Penanaman Modal, PTSP, dan Ekonomi Daerah | Provinsi DKI Jakarta | 0 kasus | 3 Laporan | 40,342,100 | PAD | | 0 kasus | | 0 |

| Kode | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | Program | Kegiatan | | Program | Kegiatan | | | | Program | Kegiatan | |
| 4 | 06 | 25 | 004 | Penyusunan Kajian Kebijakan Pembinaan BUMD, Penanaman Modal, PTSP, dan Ekonomi Daerah | Jumlah ketidaksesuaian antara kebijakan dengan peraturan | Jumlah Kajian Kebijakan Pembinaan BUMD, Penanaman Modal, PTSP dan Ekonomi Daerah | Provinsi DKI Jakarta | 0 kasus | 3 Kajian | 0 | PAD | | 0 kasus | | 0 |
| 4 | 06 | 25 | 005 | Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi | Jumlah ketidaksesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi | Provinsi DKI Jakarta | 0 kasus | 4 Laporan | 30,322,800 | PAD | | 0 kasus | | 0 |
| 4 | 06 | 25 | 006 | Penyusunan Kajian Kebijakan Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi | Jumlah ketidaksesuaian antara kebijakan dengan peraturan | Jumlah Kajian Kebijakan Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Provinsi DKI Jakarta | 0 kasus | 3 Kajian | 0 | PAD | | 0 kasus | | 0 |
| 4 | 06 | 25 | 007 | Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Perindustrian, Energi, Koperasi, UKM, serta Perdagangan | Jumlah ketidaksesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Perindustrian, Energi, Koperasi, UKM, serta Perdagangan | Provinsi DKI Jakarta | 0 kasus | 4 Laporan | 73,522,800 | PAD | | 0 kasus | | 0 |

| Kode | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | Program | Kegiatan | | Program | Kegiatan | | | | Program | Kegiatan | |
| 4 | 06 | 25 | 008 | Penyusunan Kajian Kebijakan Perindustrian, Energi, Koperasi, UKM, serta Perdagangan | Jumlah ketidaksesuaian antara kebijakan dengan peraturan | Jumlah Kajian Kebijakan Perindustrian, Energi, Koperasi, UKM serta Perdagangan | Provinsi DKI Jakarta | 0 kasus | 3 Kajian | 0 | PAD | | 0 kasus | | 0 |
| 4 | 06 | 25 | 009 | Workshop kemitraan pengembangan usaha | Jumlah ketidaksesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan | Jumlah pelaksanaan workshop | Provinsi DKI Jakarta | 0 kasus | 1 Kali | 0 | PAD | | 0 kasus | | 0 |
| 4 | 06 | 25 | 010 | Focuss Group Discussion Permodalan UKM | Jumlah ketidaksesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan | Jumlah pelaksanaan FGD permodalan UKM | Provinsi DKI Jakarta | 0 kasus | 1 Kali | 0 | PAD | | 0 kasus | | 0 |
| 4 | 06 | 25 | 011 | Pengembangan Kapasitas Pegawai Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta | Jumlah ketidaksesuaian antara kebijakan dengan peraturan | Jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan kapasitas | Provinsi DKI Jakarta | 0 kasus | 56 Orang | 0 | PAD | | 0 kasus | | 0 |
| 4 | 06 | 25 | 012 | Pelaksanaan Workshop Kemitraan Pengembangan Usaha | Jumlah ketidaksesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan | Jumlah pelaksanaan workshop | Provinsi DKI Jakarta | 0 kasus | 1 Kali | 15,455,700 | PAD | | 0 kasus | | 0 |
| 4 | 06 | 25 | 013 | Pelaksanaan Focuss Group Discussion Permodalan UKM | Jumlah ketidaksesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan | Jumlah pelaksanaan FGD permodalan UKM | Provinsi DKI Jakarta | 0 kasus | 1 Kali | 12,005,700 | PAD | | 0 kasus | | 0 |

| Kode | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | Program | Kegiatan | | Program | Kegiatan | | | | Program | Kegiatan | |
| 4 | 06 | 25 | 014 | Pendampingan Perumusan Kebijakan Perekonomian | Jumlah ketidaksesuaian antara kebijakan dengan peraturan | Jumlah Kebijakan Perekonomian | Provinsi DKI Jakarta | 0 kasus | 12 Kajian Kebijakan | 891,000,000 | PAD | | 0 kasus | | 0 |
| 4 | 06 | 25 | 015 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) | Jumlah ketidaksesuaian antara kebijakan dengan peraturan | Waktu pengelolaan Sistem Informasi PKT | Provinsi DKI Jakarta | 0 kasus | 12 Bulan | 151,333,367 | PAD | | 0 kasus | | 0 |
| 4 | 06 | 25 | 016 | Pendampingan Evaluasi Perizinan Ketataruangan, Pembangunan, dan Pertanahan | Jumlah ketidaksesuaian antara kebijakan dengan peraturan | Waktu Pendampingan | Provinsi DKI Jakarta | 0 kasus | 6 Bulan | 545,400,000 | PAD | | 0 kasus | | 0 |
| **4** | **06** | **26** | | **Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Perekonomian** | | | | | | **810,477,361** | | | | | **0** |
| 4 | 06 | 26 | 001 | Penyediaan alat tulis kantor | indeks kepuasan pelayanan kantor | Waktu penyediaan alat tulis kantor | Provinsi DKI Jakarta | 4 indeks | 12 Bulan | 100,000,000 | PAD | | 4 indeks | | 0 |
| 4 | 06 | 26 | 002 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | indeks kepuasan pelayanan kantor | Waktu ketersediaan barang cetakan dan penggandaan | Provinsi DKI Jakarta | 4 indeks | 12 Bulan | 16,966,290 | PAD | | 4 indeks | | 0 |
| 4 | 06 | 26 | 003 | Penyediaan sewa mesin fotokopi | indeks kepuasan pelayanan kantor | Jumlah mesin foto copy yang tersedia | Provinsi DKI Jakarta | 4 indeks | 2 Unit | 117,480,000 | PAD | | 4 indeks | | 0 |
| 4 | 06 | 26 | 004 | Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja | indeks kepuasan pelayanan kantor | Waktu pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja | Provinsi DKI Jakarta | 4 indeks | 12 Bulan | 33,185,471 | PAD | | 4 indeks | | 0 |
| 4 | 06 | 26 | 005 | Penyediaan makanan dan minuman | indeks kepuasan pelayanan kantor | Waktu penyediaan makanan dan minuman | Provinsi DKI Jakarta | 4 indeks | 12 Bulan | 539,272,400 | PAD | | 4 indeks | | 0 |

| Kode | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | | Rencana Tahun 2020 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | Program | Kegiatan | | Program | Kegiatan | | | | Program | Kegiatan | |
| 4 | 06 | 26 | 006 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | indeks kepuasan pelayanan kantor | Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan | Provinsi DKI Jakarta | 4 indeks | 12 Bulan | 3,573,200 | PAD | | 4 indeks | | 0 |
| 4 | 06 | 26 | 007 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | indeks kepuasan pelayanan kantor | Waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja | Provinsi DKI Jakarta | 4 indeks | 12 Bulan | 0 | PAD | | 4 indeks | | 0 |

# PENUTUP

# 5

Penutup dokumen Renja

Dokumen Renja Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta 2020 merupakan perencanaan kerja untuk periode tahun 2020. Renja merupakan penjabaran dari Renstra Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 dengan mempedomani RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020. Fungsi Renja 2020 adalah sebagai pedoman operasional dalam melaksanakan program dan kegiatan Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta sebagai upaya mencapai tujuan dan sasaran Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020. Selain itu juga dalam rangka menunjang keberhasilan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Provinsi DKI Jakarta, antara lain :

1. KSD 10 - Pembangunan Stadion Olahraga Bertaraf Internasional
2. KSD 19 - Pengembangan Pariwisata dan Budaya melalui Revitalisasi Taman Ismail Marzuki
3. KSD 20 - Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu
4. KSD 21 - Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih
5. KSD 24 - Penyediaan Perumahan melalui Skema Pendanaan Uang Muka Nol Rupiah (DP 0 Rupiah)
6. KSD 37 - Peningkatan layanan sistem pembayaran elektronik transportasi terpadu melalui Electronic Fare Collection (EFC)
7. KSD 43 - Pengembangan Smart Citg dan E-Governance melalui Dashboard Program Prioritas, Integrasi Data Kependudukan dan Jakarta One
8. KSD 51 - Penyediaan Pengolahan dan Pengelolaan Air Bersih di Kepulauan Seribu
9. KSD 54 - Pembangunan Taman Benyamin Suaeb
10. KSD 56 - Pelaksanaan Festival Seni dan Budaya Sepanjang Tahun
11. KSD 60 - Peningkatan Layanan Pengaduan Masyarakat melalui Open House Kecamatan dan aplikasi Citizen Relation Management (CRM).

Sebagai pedoman kerja, pelaksanaan Renja Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 ditetapkan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta wajib melaksanakan program dan kegiatan dalam Renja Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. Anggaran pelaksanaan Renja Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 akan dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020;
3. Pelaksanaan DPA Tahun 2020 akan dimonitoring setiap bulan dan dilaporkan kepada Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta setiap 3 bulan. Pada akhir tahun pelaksanaan program dan kegiatan Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 akan dievaluasi sebagai bahan penyusunan Renja 2021.

Selanjutnya, Renja Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 akan dijabarkan ke dalam Rencana Aksi 2020 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020.

Jakarta, Juli 2019
Kepala Biro Perekonomian
Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Mochamad Abbas
NIP 197006091997031004